

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Penelitian ini menggunakan *Agency Theory* yang mengasumsikan bahwa setiap manusia memiliki sifat egois. Menurut Scoot (2003:305) dalam Tendean (2015) mengungkapkan bahwa *Agency Theory* adalah perkembangan teori yang mempelajari bagaimana merancang kesepakatan kerja agar dapat memotivasi para agen untuk bekerja sesuai dengan keinginan principal. Teori keagenan juga mengimplikasikan adanya asimetri informasi antara manajer sebagai agen dan pemilik sebagai prinsipal.

Manajemen sebagai pengelola perusahaan lebih banyak mengetahui informasi internal sehingga terdapat kesenjangan atau *gap* akan luasnya informasi yang dimiliki oleh manajemen dengan pemilik. Oleh karena itu, sebuah keputusan tidak akan pernah memuaskan pihak agen dan prinsipal secara bersama-sama dan kedua belah pihak tidak akan benar-benar setuju untuk melakukan tindakan tersebut bila tidak ada kontrak yang mengikatnya. Permasalahan keagenan dimana terdapat perbedaan kepentingan bagi agen dan prinsipal memicu adanya *sustainability report*. Hal ini dikarenakan disatu sisi manajemen tidak ingin mengeluarkan banyak biaya dalam pembuatan *sustainability report* sedangkan sisi

lainnya investor menginginkan adanya pengungkapan aktivitas tanggung jawab sosial dan lingkungan melalui *sustainability report* sebagai dasar untuk pengambilan keputusan.

Menurut Hendriksen dan Van Breda (2000) dalam Aziz (2014) dalam rangka memahami konsep *Good Corporate Governance* (GCG), maka digunakan dasar perseptif hubungan keagenan. Waryanto (2010) dalam Aziz (2014), hubungan keagenan merupakan hubungan antara dua pihak dimana salah satu pihak menjadi *agent* dan pihak lain bertindak sebagai *principal*. Hubungan agensi muncul ketika satu orang atau lebih (*principal*) mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada *agent* tersebut.

Menurut Jensen dan Meckling (1976) dalam Aziz (2014) menjelaskan adanya konflik kepentingan dalam hubungan keagenan. Terjadinya konflik kepentingan antara pemilik dan agen karena kemungkinan agen bertindak tidak sesuai dengan kepentingan prinsipal, sehingga memicu biaya keagenan (*agency cost*). Teori agensi mampu menjelaskan potensi konflik kepentingan diantara berbagai pihak yang berkepentingan dalam perusahaan tersebut. Konflik kepentingan ini terjadi dikarenakan perbedaan tujuan dari masing-masing pihak berdasarkan posisi dan kepentingannya terhadap perusahaan (Ibrahim, 2007 dalam Aziz, 2014). Sebagai agen, manajer bertanggung jawab secara moral untuk mengoptimalkan keuntungan para pemilik (*principal*), namun demikian

manajer juga menginginkan untuk selalu memperoleh kompensasi sesuai dengan kontrak. Dengan demikian terdapat dua kepentingan yang berbeda didalam perusahaan dimana masing-masing pihak berusaha untuk mencapai atau mempertahankan tingkat kemakmuran yang dikehendaki (Ali, 2002 dalam Aziz, 2014).

2. Kualitas Pengungkapan *Sustainability Report*

Laporan berkelanjutan (*sustainability report*) memiliki definisi yang beragam, menurut (*World Business Council for Sustainable Development*, 2002 dalam Aziz, 2014) laporan berkelanjutan (*sustainability reporting*) didefinisikan sebagai laporan publik dimana perusahaan memberikan gambaran posisi dan aktifitas perusahaan pada aspek ekonomi, lingkungan dan sosial karena *stakeholder* internal dan eksternal. Elkington (1997) dalam Aziz (2014) mendefinisikan laporan berkelanjutan (*sustainability reporting*) sebagai laporan yang memuat tidak saja informasi kinerja keuangan tetapi juga informasi non keuangan yang terdiri dari aktivitas sosial dan lingkungan yang memungkinkan perusahaan bisa tumbuh secara berkesinambungan. Sementara itu sihotang (2006) dalam aziz (2014) mengartikan laporan berkelanjutan (*sustainability reporting*) sebagai laporan mengenai aspek ekonomi, sosial dan lingkungan dari aturan dampak dan kinerja perusahaan dan produknya dalam konteks pembangunan yang berkelanjutan (*triple bottom line reporting*). Dengan demikian, laporan berkelanjutan (*sustainability reporting*) dapat diartikan

sebagai laporan yang meliputi 3 aspek keuangan, aspek lingkungan dan aspek sosial perusahaan.

3. *Good Corporate Governance (GCG)*

Menurut Aziz (2014) *Good Corporate Governance (GCG)* merupakan tata kelola perusahaan yang memiliki agenda yang lebih luas lagi dimasa yang akan datang. Fokus dari akuntabilitas perusahaan yang semula masih terkonsentrasi atau berorientasi pada para pemegang saham (*stockholder*), sekarang menjadi lebih luas dan untuk tata kelola perusahaan juga harus memperhatikan kepentingan *stakeholder*. Akibat yang muncul dari pergeseran paradigma ini, tata kelola perusahaan harus mempertimbangkan masalah seperti *corporate social responsibility (CSR)*. Kebijakan dan tata kelola suatu perusahaan pada masa mendatang harus lebih memperhatikan kebutuhan dari para *stakeholder* (Murtanto, 2005:4 dalam Aziz, 2014). Pengungkapan (*disclosure*) terhadap aspek ekonomi (*economic*), lingkungan (*environmental*) dan sosial (*social*) sekarang ini menjadi cara bagi perusahaan untuk mengkomunikasikan bentuk akuntabilitasnya kepada *stakeholder*. Hal ini dikenal dengan nama *sustainability reporting* atau *triple bottom line reporting* yang direkomendasikan oleh *Global Reporting Initiative (GRI)*.

Menurut *Finance Committee on Corporate Governance* dalam Aziz (2014), *corporate governance* merupakan proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis serta aktivitas

perusahaan ke arah peningkatan pertumbuhan bisnis dan akuntabilitas perusahaan.

Prinsip dari *corporate governance* di Indonesia dengan KepMen BUMN pada Bab II pasal 3 dalam Winata (2014) meliputi lima prinsip yaitu:

- a. Transparansi (*transparency*) biasa disebut dengan keterbukaan informasi yaitu keterbukaan dalam melakukan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan.
- b. Kemandirian (*independency*) yakni suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manajemen yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
- c. Akuntabilitas (*akuntability*) yaitu kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.
- d. Pertanggungjawaban (*responsibility*) yaitu kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku.
- e. Kewajaran dan kesetaraan (*fairness*) yaitu perlakuan yang adil dan setara dalam memenuhi hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku.

Kaitannya dengan *corporate governance*, terdapat mekanisme *good corporate governance*, yaitu sebagai berikut:

a. Ukuran Dewan Komisaris

Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas No 40 tahun 2007 dalam Aziz (2014), pada Pasal 108 ayat (5) dijelaskan bahwa bagi perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas, maka wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) anggota Dewan Komisaris. Oleh karena itu, jumlah anggota Dewan Komisaris dalam tiap perusahaan berbeda-beda jumlahnya karena harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektivitas dalam pengambilann keputusan. Dewan Komisaris terdiri dari komisaris independen dan komisaris non independen. Komisaris independen merupakan komisaris yang tidak berasal dari pihak terafiliasi, sedangkan komisaris non independen merupakan komisaris yang terafiliasi. Maksud dari terafiliasi adalah pihak yang memiliki hubungan bisnis dan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali, anggota Direksi dan Dewan Komisaris lain, serta dengan perusahaan itu sendiri. Mantan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang terafiliasi serta karyawan perusahaan, untuk jangka waktu tertentu termasuk dalam kategori terafiliasi (KNKG, 2006 dalam Aziz, 2014).

b. Proporsi Komisaris Independen

Komisaris independen menurut Pohan (2008) dalam Sari (2014) mendefinisikan komisaris independen sebagai seseorang yang tidak

terafiliasi dalam segala hal dengan pemegang saham pengendali, tidak memiliki hubungan afiliasi dengan direksi atau dewan komisaris serta tidak menjabat sebagai direktur pada suatu perusahaan yang terkait dengan perusahaan pemilik menurut peraturan yang dikeluarkan di Bursa Efek Indonesia. Jumlah komisaris independen proporsional dengan jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham yang dimiliki oleh pemegang saham yang tidak berperan sebagai pengendali dengan ketentuan jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya tiga puluh persen (30%) dari seluruh anggota komisaris, disamping hal itu komisaris independen memahami undang-undang dan peraturan yang bukan merupakan pemegang saham pengendali dalam rapat umum pemegang saham.

Komisaris independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak terafiliasi dengan Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan. Menurut Andriyani (2008) dalam Kurniasih dan Sari (2013) Komisaris Independen dapat melaksanakan fungsi *monitoring* untuk mendukung pengelolaan perusahaan yang baik dan menjadikan laporan keuangan menjadi lebih obyektif.

c. Ukuran Komite Audit

Keputusan ketua Bapepam Nomor Kep-29/PM/2004 dalam Aziz (2014) yang termuat dalam peraturan Nomor IX.5.1 disebutkan bahwa Komite Audit yang dimiliki oleh perusahaan minimal terdiri dari 3 (tiga) orang, dimana sekurang-kurangnya 1 (satu) orang berasal dari Komisaris Independen dan 2 (dua) orang anggota berasal dari luar emiten atau perusahaan publik. Jumlah anggota komite audit harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dan tetap memperhatikan efektifitas dalam pengambilan keputusan.

Menurut *Institute of Internal Auditor* dalam *Internal Auditing and The Audit Committee*, jumlah anggota Komite Audit disesuaikan dengan besar kecilnya organisasi dan tanggung jawab. Namun biasanya tiga sampai lima anggota merupakan jumlah yang cukup ideal. Komite Audit biasanya perlu untuk mengadakan rapat tiga sampai empat kali setahun untuk melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya yang menyangkut soal sistem pelaporan keuangan.

Terdapat beberapa kualifikasi anggota komite audit, menurut *The Treadway Commission* (1993) dalam Utama (2004), antara lain:

- 1) Independen.
- 2) Memahami aktivitas bisnis (*broad business knowledge*).
- 3) Memiliki kemampuan komunikasi, *natural curiosity* dan *healthy skepticism*.
- 4) *Vigilance*.

d. Kepemilikan Saham Institusional

Dewan komisaris adalah salah satu bagian yang ada dalam struktur organisasi perusahaan yang memiliki kedudukan cukup tinggi, maka dewan komisaris dapat melakukan pengawasan terhadap implementasi kebijakan direksi dan memberikan nasihat dalam menjalankan aktifitas demi peningkatan nilai perusahaan.

e. Kepemilikan Saham Terkonsentrasi

Menurut Aziz (2014) bahwa kepemilikan saham terkonsentrasi merupakan kepemilikan saham yang sebagian besar saham dimiliki oleh sebagian kecil individu atau kelompok tertentu. Kepemilikan saham dikatakan terkonsentrasi apabila dalam perusahaan tersebut pemegang saham pengendali atau utama, yaitu kepemilikan saham yang besarnya lebih dari 50% hak suara pada suatu perusahaan.

4. Ukuran Perusahaan

Secara umum ukuran dapat diartikan sebagai suatu perbandingan besar atau kecilnya suatu objek. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ukuran diartikan sebagai: 1) Alat untuk mengukur (seperti meter, kilogram dan sebagainya); 2) sesuatu yang dipakai untuk menentukan; 3) pendapatan mengukur; 4) panjangnya (lebarnya, luasnya dan besarnya) sesuatu.

Menurut Bapepam No. 9 tahun 1995 dalam Aziz (2014) berdasarkan ukuran, perusahaan dapat digolongkan atas 2 kelompok sebagai berikut:

a. Perusahaan kecil

Perusahaan kecil merupakan badan hukum yang didirikan di Indonesia yang: 1) memiliki sejumlah kekayaan (total asset) tidak lebih dari Rp. 20 Miliar; 2) bukan merupakan afiliasi dan dikendalikan oleh suatu perusahaan yang bukan perusahaan menengah atau kecil; 3) bukan merupakan reksadana.

b. Perusahaan menengah atau besar

Perusahaan menengah atau besar merupakan kegiatan ekonomi yang mempunyai kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan usaha. Usaha ini meliputi usaha nasional (milik Negara atau swasta) dan usaha asing yang melakukan kegiatan di Indonesia.

Berbagai cara dapat dilakukan untuk mengklasifikasikan ukuran perusahaan yaitu berdasarkan jumlah karyawan, kapitalisasi pasar dan jumlah total asset. Secara umum perusahaan besar akan mengungkapkan informasi lebih banyak dari pada perusahaan kecil.

Hal ini karena perusahaan besar akan menghadapi resiko politis yang lebih besar dibandingkan perusahaan kecil. Secara teoritis perusahaan besar tidak akan lepas dari tekanan politis, yaitu tekanan untuk melakukan pertanggungjawaban sosial. Dengan pengungkapan kepedulian pada lingkungan melalui pelaporan tahunan (*annual report*) maka perusahaan dalam jangka waktu panjang bisa terhindar dari biaya yang sangat besar akibat dari tuntutan masyarakat. Selain itu, pada umumnya perusahaan besar memiliki beragam produk dan berorientasi

diberbagai wilayah, termasuk luar negeri sehingga perusahaan besar lebih banyak melakukan pengungkapan sukarela dibandingkan perusahaan kecil (Prasojo, 2011 dalam Putri, 2013).

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai pengaruh mekanisme *Good Corporate Governance* (GCG) dan ukuran perusahaan terhadap kualitas pengungkapan *sustainability report* telah banyak dilakukan di Indonesia dan negara lain dengan berbagai modifikasi dan inovasi model penelitian yang dilakukan. Namun, perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada tahun dan objek penelitiannya yaitu pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2015. Berbagai hasil penelitian terdahulu sehingga terangkum dalam tabel berikut:

Tabel 2.1
Ringkasan Hasil dari Penelitian Terdahulu

No	Peneliti dan Tahun	Topik Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1	Aziz (2014)	Analisis pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) terhadap kualitas pengungkapan <i>sustainability report</i> .	Dependen: Kualitas Pengungkapan <i>sustainability report</i> Independen: Ukuran dewan komisaris, proporsi komisaris independen, ukuran komite	Ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas pengungkapan <i>sustainability report</i> , proporsi komisaris independen tidak berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas pengungkapan <i>sustainability report</i> , ukuran komite audit tidak berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas pengungkapan <i>sustainability</i>

			audit, kepemilikan saham manajerial, kepemilikan saham institusional, kepemilikan saham terkonsentrasi dan ukuran perusahaan.	<i>report</i> , kepemilikan saham manajerial berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas pengungkapan <i>sustainability report</i> , kepemilikan saham institusional tidak berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas pengungkapan <i>sustainability report</i> , kepemilikan saham terkonsentrasi tidak berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas pengungkapan <i>sustainability report</i> , ukuran perusahaan tidak berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas pengungkapan <i>sustainability report</i> .
2	Aniktia dan Khafid (2015)	Pengaruh mekanisme <i>good corporate governance</i> dan kinerja keuangan terhadap pengungkapan <i>sustainability report</i> .	Dependen: Pengungkapan <i>sustainability report</i> . Independen: Dewan komisaris independen, komite audit, kepemilikan manajerial, <i>governance committee</i> , profitabilitas, <i>leverage</i> .	Dewan Komisaris independen tidak berpengaruh positif terhadap pengungkapan <i>sustainability report</i> , komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan <i>sustainability report</i> , kepemilikan manajerial tidak berpengaruh positif terhadap pengungkapan <i>sustainability report</i> , <i>governance committee</i> berpengaruh positif terhadap pengungkapan <i>sustainability report</i> , profitabilitas (ROA) tidak berpengaruh positif terhadap pengungkapan <i>sustainability report</i> , <i>leverage</i> berpengaruh terhadap pengungkapan <i>sustainability report</i> dengan arah positif.
3	Nasir dkk (2014)	Pengaruh karakteristik perusahaan dan <i>corporate governanve</i> terhadap pengungkapan	Dependen: Pengungkapan <i>sustainability report</i> . Independen: Profitabilitas,	<i>Return on asset</i> (ROA) berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan <i>sustainability report</i> pada perusahaan LQ45, <i>current ratio</i> (CR) tidak berpengaruh signifikan terhadap

		<p><i>sustainability report</i> pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di BEI.</p>	<p>likuiditas, <i>leverage</i>, aktivitas perusahaan,, ukuran perusahaan, komite audit, dewan direksi, <i>governance committee</i>.</p>	<p>pengungkapan <i>sustainability report</i> pada perusahaan LQ45, <i>debt to equity ratio</i> (DER) berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan <i>sustainability report</i> pada perusahaan LQ45, <i>inventory turnover</i> (ITO) tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan <i>sustainability report</i> pada perusahaan LQ45, ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan <i>sustainability report</i> pada perusahaan LQ45, komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan <i>sustainability report</i> pada perusahaan LQ45, dewan direksi tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan <i>sustainability report</i> pada perusahaan LQ45, dan <i>governance committee</i> (GC) berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan <i>sustainability report</i> pada perusahaan LQ45.</p>
4	Sari dan Marsono (2013)	<p>Pengaruh kinerja keuangan, ukuran perusahaan dan <i>corporate governance</i> terhadap pengungkapan <i>sustainability report</i></p>	<p>Dependen: Pengungkapan <i>sustainability report</i>.</p> <p>Independen: Profitabilitas, likuiditas, <i>leverage</i>, aktivitas perusahaan, ukuran perusahaan, komite audit, dewan direksi dan dewan</p>	<p>Profitabilitas berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan <i>sustainability report</i>, likuiditas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan <i>sustainability report</i>, <i>leverage</i> tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan <i>sustainability report</i>, tingkat aktivitas perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan <i>sustainability report</i>, ukuran perusahaan tidak berpengaruh secara</p>

			komisaris independen.	signifikan terhadap pengungkapan <i>sustainability report</i> , komite audit berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan <i>sustainability report</i> , dewan direksi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan <i>sustainability report</i> dan dewan komisaris independen berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan <i>sustainability report</i> .
5	Suryono dan Prastiwi (2011)	Pengaruh karakteristik perusahaan dan <i>Corporate Governance</i> (CG) terhadap praktik pengungkapan <i>sustainability report</i> .	<p>Dependen: Pengungkapan <i>sustainability report</i>.</p> <p>Independen: Profitabilitas, likuiditas, <i>leverage</i>, rasio analisis aktivitas, ukuran perusahaan, komite audit, dewan direksi dan <i>governance committee</i>.</p>	Profitabilitas yang diprosikan dengan ROA dan ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap praktik pengungkapan SR, komite audit dan dewan direksi yang masing-masing diprosi dengan jumlah rapat berpengaruh positif signifikan terhadap praktik pengungkapan SR.

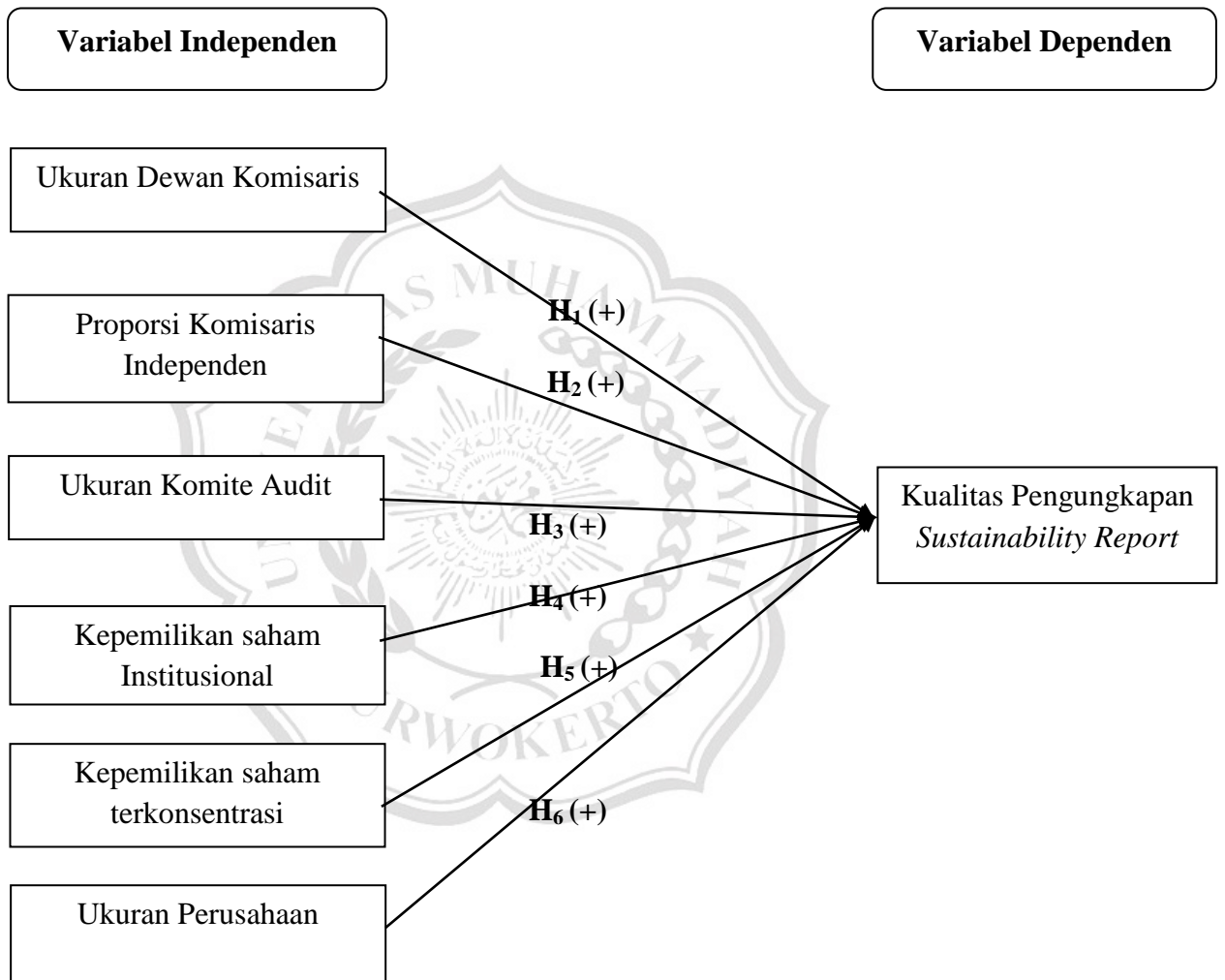
Sumber: Penelitian-penelitian sebelumnya

C. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu, penelitian ini menggunakan variabel independen ukuran dewan komisaris, proporsi komisaris independen, ukuran komite audit, kepemilikan saham manajerial, kepemilikan saham institusional, kepemilikan saham terkonsentrasi dan

ukuran perusahaan, sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah kualitas pengungkapan *sustainability report*.

Adapun kerangka pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Model Penelitian

D. Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, dapat diambil hipotesis penelitian ini sebagai berikut:

1. Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris Terhadap Kualitas Pengungkapan *Sustainability Report*

Menurut Sulastini (2007) dalam Aziz (2014) berdasarkan teori agensi, Dewan Komisaris dianggap sebagai mekanisme pengendalian intern tertinggi, yang bertanggung jawab untuk memonitor tindakan manajemen. Melalui peran monitoring oleh Dewan Komisaris, perusahaan dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dapat terjamin kelangsungannya.

Dengan proses monitoring yang baik, maka diharapkan kualitas pengungkapan informasi *sustainability report* semakin luas, dikarenakan kemungkinan manajer untuk menyembunyikan informasi dapat dikurangi. Hal ini berarti bahwa semakin banyak jumlah anggota Dewan Komisaris dalam suatu perusahaan, maka monitoring akan berjalan dengan baik dan pengungkapan tanggung jawab sosial yang dibuat perusahaan akan semakin luas. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis pertama yang diajukan oleh peneliti sebagai berikut:

H1: ukuran dewan komisaris berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas pengungkapan *sustainability report*.

2. Pengaruh Proporsi Komisaris Independen Terhadap Kualitas Pengungkapan *Sustainability Report*

Penelitian Agrawal dan Knoeber (1996); Baysinger dan Butler (1985) dalam Aziz (2014) menemukan bahwa dengan adanya Dewan Komisaris Independen, pengelolaan perusahaan lebih efektif dan dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Apabila jumlah Komisaris Independen semakin besar atau dominan, hal ini dapat memberikan *power* kepada Dewan Komisaris untuk menekan manajemen dalam meningkatkan kualitas pengungkapan perusahaan (Haniffa dan Cooke, 2002 dalam Aziz, 2014).

Dengan demikian, semakin besar komposisi Independensi Dewan Komisaris, maka kemampuan Dewan Komisaris untuk mengambil keputusan dalam rangka melindungi seluruh pemangku kepentingan dan mengutamakan perusahaan semakin objektif. Dengan kata lain, semakin besar komposisi Komisaris Independen, maka Dewan Komisaris dapat bertindak semakin objektif dan mampu melindungi seluruh pemangku kepentingan. Hal ini mendorong kualitas pengungkapan *sustainability report* secara lebih luas. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis kedua yang diajukan oleh peneliti sebagai berikut:

H2: proporsi komisaris independen berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas pengungkapan *sustainability report*.

3. Pengaruh Ukuran Komite Audit Terhadap Kualitas Pengungkapan

Sustainability Report

Collier (1993) dalam Aziz (2014) menyatakan bahwa keberadaan Komite Audit membantu menjamin pengungkapan dan sistem pengendalian akan berjalan dengan baik. Dengan demikian, diharapkan ukuran komite audit yang semakin besar, maka pengawasan yang dilakukam akan semakin baik dan kualitas pengungkapan informasi sosial yang dilakukan perusahaan semakin meningkat atau semakin luas (Waryano, 2010 dala Aziz 2014). Berdasarkan penjelasan di atas maka penelitian ini mengajukan hipotesis ketiga sebagai berikut:

H3 : ukuran komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas pengungkapan *sustainability report*.

4. Pengaruh Kepemilikan Saham Institusional Terhadap Kualitas

Pengungkapan Sustainability Report

Menurut Machmud dan Djakman (2008), perusahaan dengan kepemilikan institusional yang besar akan lebih mampu untuk memonitor manajemen. Semakin besar kepemilikan institusional maka akan semakin efisien pemanfaatan aktiva perusahaan dan diharapkan juga dapat bertindak sebagai pencegahan terhadap pemborosan yang dilakukan manajemen.

Penelitian Trabelsi et.al (2005) dan Ajinkya et.al (2005) dalam Aziz (2014), menemukan bahwa kepemilikan institusional dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas pengungkapan sukarela. Menurut Summa dan Ben

Ali (2006) dalam Aziz (2014), Investor institusional memiliki *power* dan *experience* untuk bertanggung jawab dalam menerapkan prinsip *corporate governance* untuk melindungi hak dan kepentingan seluruh pemegang saham, sehingga mereka menuntut perusahaan untuk melakukan komunikasi secara transparan (Waryanto, 2010 dalam Aziz 2014). Hal ini berarti, dengan kepemilikan institusional yang besar dapat mendorong kualitas informasi dan pengungkapan *sustainability report* yang dilakukan oleh perusahaan. Berdasarkan penjelasan diatas maka penelitian ini mengajukan hipotesis keempat sebagai berikut:

H4: ukuran kepemilikan saham institusional berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas pengungkapan *sustainability report*.

5. Pengaruh Kepemilikan Saham Terkonsentrasi Terhadap Kualitas Pengungkapan *Sustainability Report*

Struktur kepemilikan saham mencerminkan distribusi kekuasaan dan pengaruh diantara pemegang saham atas kegiatan operasional perusahaan. Salah satu karakteristik struktur kepemilikan adalah konsentrasi kepemilikan yang terbagi dalam dua bentuk struktur kepemilikan yaitu kepemilikan terkonsentrasi dan kepemilikan menyebar (Nuryaman, 2008 dalam Aziz 2014). Kepemilikan saham dikatakan terkonsentrasi jika sebagian besar saham dimiliki oleh sebagian kecil individu atau kelompok, sehingga pemegang saham tersebut memiliki jumlah saham yang relative dominan dibandingkan dengan yang lainnya (Waryanto, 2010 dalam Aziz, 2014).

Dengan kepemilikan saham yang terkonsentrasi, maka pemegang saham dapat mengimbangi informasi yang dimiliki manajer, dengan kata lain proses monitoring dari pihak pemegang saham terhadap manajemen dapat berjalan dengan baik dan tindakan oportunistik manajemen untuk menyembunyikan informasi akan berkurang. Dengan demikian dapat mendorong kualitas pengungkapan *sustainability report* untuk dilakukan dengan lebih luas. Berdasarkan penjelasan di atas maka penelitian ini mengajukan hipotesis kelima sebagai berikut:

H5: kepemilikan saham terkonsentrasi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas pengungkapan *sustainability report*.

6. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Kualitas Pengungkapan *Sustainability Report*

Ukuran perusahaan merupakan variabel yang banyak digunakan untuk menjelaskan pengungkapan pertanggungjawaban sosial dalam laporan tahunan (*annual report*). Penelitian yang dilakukan Belkaoui dan Karpik (1989) dalam Aziz (2014) menemukan hasil bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial. Dalam kerangka teori agensi, apabila ukuran perusahaan lebih besar, maka biaya keagenan yang dikeluarkan juga lebih besar, sehingga untuk mengurangi biaya keagenan tersebut, perusahaan akan cenderung mengungkapkan informasi yang lebih luas. Disamping itu perusahaan yang lebih besar akan mendapat sorotan yang lebih banyak dari masyarakat. Oleh karena itu, pengungkapan yang lebih besar

merupakan cara untuk mengurangi biaya politis sebagai tanggung jawab sosial perusahaan (Sembiring, 2005 dalam Aziz, 2014). Berdasarkan penjelasan diatas maka penelitian ini mengajukan hipotesis keenam sebagai berikut:

H6: ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas pengungkapan *sustainability report*.

